

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019, yang menggambarkan pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2017, proyeksi tahun 2018 dan 2019 serta memuat kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan pada tahun 2019. Pada bagian ini juga membahas tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2019 agar arah pembangunan daerah tahun 2019 dapat dicapai.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2019 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021. Pembangunan di tahun 2019 merupakan implementasi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dengan tema “Pemantapan Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan”.

Untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan tersebut, diperlukan sinergi dan harmonisasi antara berbagai pihak yang terkait, melalui implementasi program dan kegiatan prioritas pengentasan kemiskinan, guna pencapaian Visi “Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera Untuk Semua”.

Dasar dari kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang efektif dan efisien, adalah berdasarkan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besarnya pendapatan dari sektor-sektor potensial serta pemanfaatan aset daerah. Anggaran daerah harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021. Sedangkan kebijakan anggaran belanja didasarkan pada *money follow program prioritas*.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan tahun 2019 kebijakan perekonomian Kabupaten Wonosobo tahun 2019 diarahkan pada pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan pendapatan dengan meningkatkan potensi lokal

berbasis komoditas dan kawasan yang didukung dengan penyediaan infrastruktur dan kepastian regulasi dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017

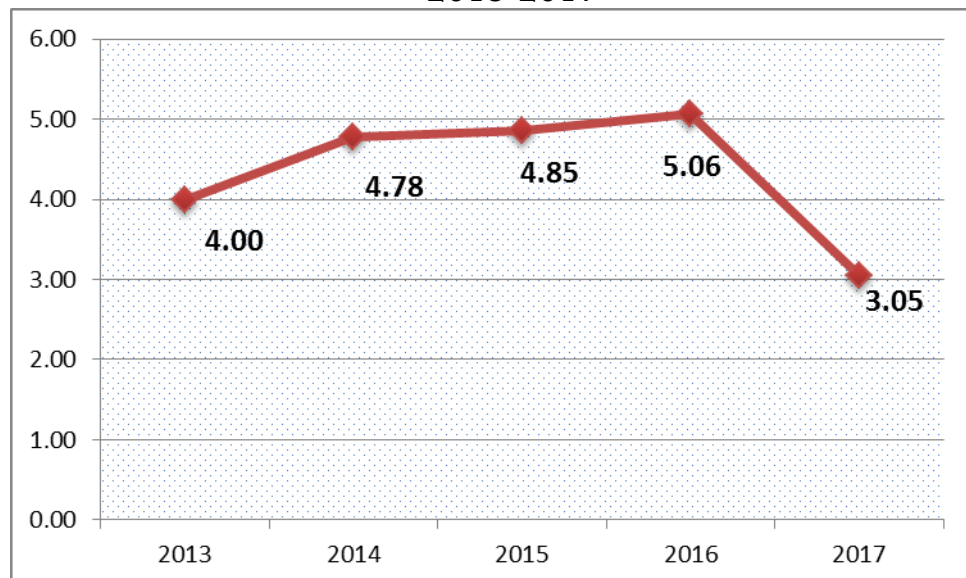
Kondisi ekonomi makro daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung laju pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju inflasi.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami tren meningkat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 4,00%, tahun 2014 sebesar 4,78%, tahun 2015 sebesar 4,85%, tahun 2016 sebesar 5,06%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu sebesar 3,05%.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar III.1.

Gambar III.1.
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2013-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik (2017), Bappeda (2018)

Penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 terjadi karena adanya penurunan pertumbuhan di sektor primer, utamanya di

lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan di mana pada tahun 2016 sebesar 5,62% menurun dengan tajam di tahun 2017 menjadi -1,92%. Di samping itu juga ada pelambatan pertumbuhan di sektor tersier yaitu jasa keuangan dan asuransi yang pada tahun 2016 sebesar 9,75% menurun di tahun 2017 sebesar 5,68% serta sektor tersier yang lainnya yang sebagian besar juga mengalami penurunan pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo secara lengkap dapat dilihat pada Tabel III.1.

Tabel III.1.

Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2013-2017 Kabupaten Wonosobo
Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan				
		2013	2014	2015*)	2016**)	2017***)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,13	3,61	3,59	5,62	-1,92
2	Pertambangan dan Penggalian	3,78	2,17	0,26	2,07	3,57
3	Industri Pengolahan	5,63	3,66	4,82	1,75	3,72
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,50	3,96	0,17	1,98	5,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,87	9,32	2,11	2,24	1,28
6	Konstruksi	5,96	3,50	6,37	6,88	7,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,45	5,13	4,21	4,85	4,72
8	Transportasi dan Pergudangan	9,18	8,22	7,28	7,62	5,86
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,46	7,08	7,44	-0,06	5,25
10	Informasi dan Komunikasi	9,12	12,11	9,42	7,31	13,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,42	6,52	9,45	9,75	5,68
12	Real Estate	7,04	6,50	7,54	6,82	6,49
13	Jasa Perusahaan	10,84	9,07	9,84	9,62	8,72
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,35	0,95	5,25	2,14	2,57
15	Jasa Pendidikan	9,50	7,10	5,44	7,33	7,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	8,57	11,66	7,08	9,73	8,60
17	Jasa Lainnya	8,82	8,57	3,10	7,62	8,99
Laju pertumbuhan (%)		4,00	4,78	4,85	5,06	3,05

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo dan Bappeda (2018)

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Kabupaten Wonosobo tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 11.749,52 milyar meningkat di tahun 2017 menjadi Rp. 16.382,54 milyar. Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 dari Rp. 10.333,76 milyar di tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 12.291,93 milyar di tahun 2017. Dari tujuh belas lapangan usaha sebagian besar mengalami kenaikan baik untuk harga konstan maupun harga berlaku.

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Wonosobo secara lengkap dapat dilihat pada Tabel III.2.

Tabel III.2.
 Nilai PDRB Kabupaten Wonosobo Tahun 2013-2017 Menurut Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	ADHB (Milyar Rupiah)					ADHK (Milyar Rupiah)				
		2013	2014	2015*)	2016**)	2017***)	2013	2014	2015*)	2016**)	2017***)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.910,22	4.293,20	4.647,01	5.068,39	5.138,69	3.402,32	3.518,27	3.644,70	3.849,56	3.775,53
2	Pertambangan dan Penggalian	109,52	115,30	122,04	128,38	145,37	99,76	101,92	102,19	104,30	108,02
3	Industri Pengolahan	1.980,08	2.219,19	2.412,23	2.540,70	2.758,59	1.712,64	1.783,41	1.869,37	1.902,07	1.972,87
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,92	4,34	4,48	4,93	5,44	4,19	4,41	4,42	4,50	4,73
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,45	14,29	15,12	15,77	16,43	12,98	13,49	13,77	14,08	14,26
6	Konstruksi	712,64	800,19	892,61	972,75	1.064,71	637,35	659,65	701,67	749,91	803,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.032,31	2.194,02	2.348,43	2.551,52	2.777,39	1.862,82	1.958,34	2.040,78	2.139,76	2.240,72
8	Transportasi	559,88	647,92	718,91	781,55	870,39	553,53	599,05	642,64	691,60	732,10

No	Lapangan Usaha	ADHB (Milyar Rupiah)					ADHK (Milyar Rupiah)				
		2013	2014	2015*)	2016**)	2017***)	2013	2014	2015*)	2016**)	2017***)
	dan Pergudangan										
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	369,50	416,59	464,95	486,66	523,97	318,67	341,23	366,63	366,40	385,63
10	Informasi dan Komunikasi	126,73	136,46	148,22	159,20	188,32	130,69	146,52	160,32	172,03	194,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	341,45	380,82	437,13	493,01	537,76	281,89	300,08	328,43	360,44	380,90
12	Real Estate	171,01	191,57	212,05	229,21	250,23	166,11	176,90	190,24	203,20	216,39
13	Jasa Perusahaan	25,38	28,73	33,29	37,68	42,52	21,99	23,98	26,34	28,88	31,40
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	318,06	341,92	374,46	403,19	427,11	270,27	272,83	287,16	293,30	300,84
15	Jasa Pendidikan	700,22	778,75	842,31	932,14	1.047,17	524,20	561,43	591,95	635,36	680,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143,81	169,70	191,09	212,45	231,80	117,81	131,54	140,86	154,56	167,85
17	Jasa lainnya	231,35	268,09	286,20	319,67	356,66	216,56	235,13	242,41	258,45	281,70
PDRB		11.749,52	13.001,09	14.150,51	15.337,19	16.382,54	10.333,76	10.828,17	11.353,87	11.928,40	12.291,93

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo(2017), Bappeda (2018)

*Ket: *), **)Angka sementara
***) Angka prediksi*

Perkembangan distribusi sektor ekonomi Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2013-2017 masih didominasi oleh lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan diikuti lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha industri pengolahan. Pada tahun 2017 peranan lapangan usaha pertanian masih menduduki peringkat tertinggi sebesar 31,37 persen, kemudian disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,95 persen dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peranan lapangan usaha terbesar dalam PDRB masih berada di sektor primer dan sektor sekunder. Jika dibandingkan tahun 2016, pada tahun 2017 sebagian besar lapangan usaha mengalami peningkatan peranan dan hanya dua lapangan usaha yang mengalami penurunan kontribusi yaitu yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kondisinya menurun dari 33,05% di tahun 2016 menjadi 31,37% di tahun 2017 serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial di mana pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 2,63% menurun menjadi 2,61% di tahun 2017. Perkembangan kontribusi lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Wonosobo secara lengkap dapat dilihat pada Tabel III.3.

Tabel III.3.
Struktur PDRB Tahun 2013-2017 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

No	Lapangan Usaha	Kontribusi (%)				
		2013	2014	2015*)	2016**)	2017***)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	33,28	33,02	32,84	33,05	31,37
2	Pertambangan dan Penggalian	0,93	0,98	0,86	0,84	0,89
3	Industri Pengolahan	16,85	17,07	17,05	16,57	16,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
6	Konstruksi	6,07	6,15	6,31	6,34	6,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,30	16,88	16,60	16,64	16,95

No	Lapangan Usaha	Kontribusi (%)				
		2013	2014	2015*)	2016**)	2017***)
8	Transportasi dan Pergudangan	4,77	4,98	5,08	5,10	5,31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,14	3,20	3,29	3,17	3,20
10	Informasi dan Komunikasi	1,08	1,05	1,05	1,04	1,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91	2,93	3,09	3,21	3,28
12	Real Estate	1,46	1,47	1,50	1,49	1,53
13	Jasa Perusahaan	0,22	0,22	0,24	0,25	0,26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,71	2,63	2,65	2,63	2,61
15	Jasa Pendidikan	5,96	5,99	5,95	6,08	6,39
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	1,22	1,31	1,35	1,39	1,41
17	Jasa Lainnya	1,97	2,06	2,02	2,08	2,18
Jumlah		100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo (2017), Bappeda (2018)

PDRB per kapita Kabupaten Wonosobo tahun 2013-2017 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dimana pada tahun 2013 PDRB per kapita ADHB sebesar Rp. 15.272.649,57 meningkat menjadi Rp. 19.087.795,29 di tahun 2017. Demikian pula PDRB ADHK tahun 2013 sebesar Rp. 13.432.360,94 meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp. 14.321.702,82. PDRB per kapita Kabupaten Wonosobo secara lengkap dapat dilihat pada Tabel III.4.

Tabel III.4.

PDRB per Kapita Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 – 2017

Tahun	ADHB	ADHK
2013	15.272.649,57	13.432.360,94
2014	16.812.914,45	14.002.907,98
2015*)	18.209.005,96	14.610.264,02
2016**)	19.646.266,34	15.279.752,98
2017***)	19.087.795,29	14.321.702,82

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo (2017), Bappeda (2018)

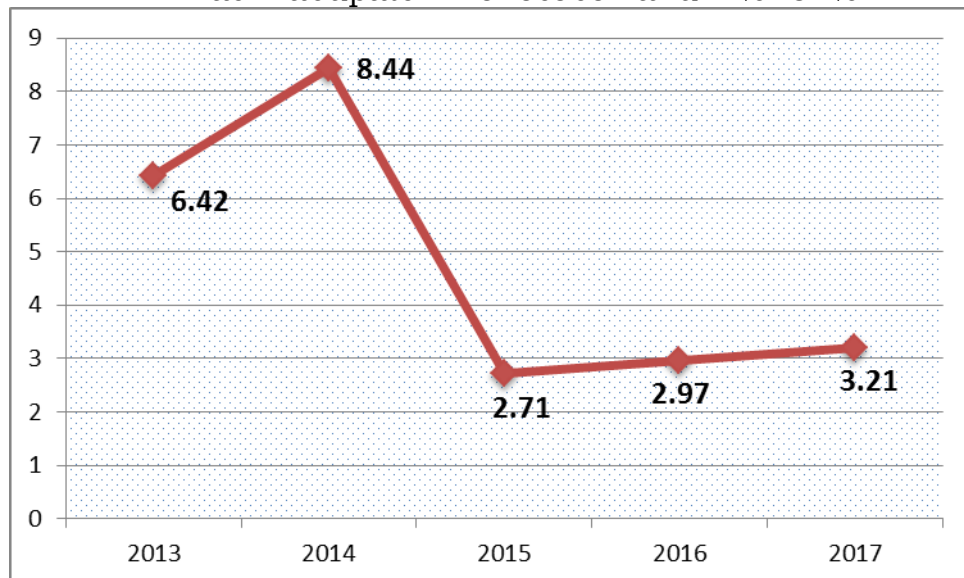
Ket : *) **) Angka sementara

***) Angka prediksi

c. Inflasi

Inflasi Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu tahun 2013-2017 masih dalam batas yang wajar dengan angka inflasi pada tahun 2013 sebesar 6,42 dan tahun 2017 sebesar 3,21. Kondisi tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu 2,97 tetapi peningkatannya tidak terlalu signifikan. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh terjaganya pasokan, ketersediaan dan stabilnya harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Perkembangan inflasi Kabupaten Wonosobo secara lengkap dapat dilihat pada Gambar III.2.

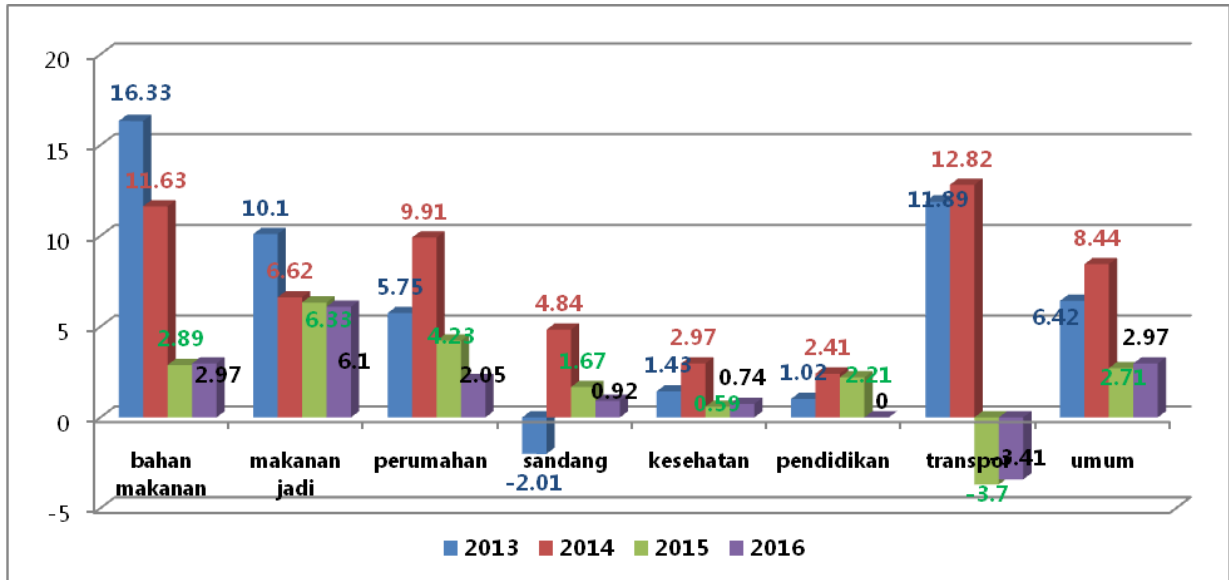
Gambar III.2.
Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2014- 2018

Beberapa komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi selama tahun 2013 sampai 2016 adalah bahan makanan, makanan jadi dan perumahan. Secara lengkap sumbangan komoditas pada angka inflasi Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada Gambar III.3.

Gambar III.3.
Sumbangan Komoditas untuk Angka Inflasi
Kabupaten Wonosobo
Tahun 2013-2016



Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2014-2017

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Kondisi perekonomian Kabupaten Wonosobo tahun 2019 diperkirakan akan dipengaruhi kebijakan perekonomian pusat, perbaikan iklim investasi dan perbaikan daya saing investasi akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia pada tahun yang semakin membaik ditopang oleh kinerja ekspor. Disisi lain perekonomian Indonesia menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global seperti: perang dagang yang dikobarkan Amerika, konflik perjanjian nuklir Iran dan perkembangan situasi politik di kawasan Semenanjung Korea.

Beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Wonosobo antara lain :

1. Masih banyaknya penduduk yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan.
2. Peningkatan barang-barang impor yang berpengaruh pada daya saing produk lokal di Kabupaten Wonosobo.
3. Fluktuasi harga terutama pangan dan pasokannya.

4. Meningkatnya tenaga kerja asing yang akan berakibat pada menurunnya daya serap tenaga kerja lokal sehingga pengangguran akan semakin meningkat.
5. Meningkatkan tuntutan sertifikasi dan peningkatan standar kualitas produk.
6. Tingginya resiko bencana alam pada beberapa wilayah di Kabupaten Wonosobo.

Peluang yang dapat dimanfaatkan Kabupaten Wonosobo antara lain :

1. Letak geografis dan potensi ekonomi Kabupaten Wonosobo yang cukup besar di sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan dan pariwisata.
2. Kualitas infrastruktur ekonomi yang semakin membaik
3. Potensi alam Kabupaten Wonosobo yang sebagian besar berpotensi pariwisata.
4. Berkembangnya klaster usaha berbasis komoditas unggulan daerah.
5. Meningkatnya hilirisasi industri berbasis pertanian.
6. Komitmen dan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan potensi lokal.
7. Meningkatnya sinergitas kegiatan antar organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Wonosobo saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kabupaten Wonosobo tahun 2018 dan 2019 dapat diprediksikan sebagai mana tabel berikut.

Tabel III.5
Perkembangan Ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2015-2016,
dan Prediksi Tahun 2018-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018*)	2019*)
1.	PDRB :					
	Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp)	14.150,51	15.337,19	16.382,54	16.888,08	17.767,27
	Atas Dasar Harga	11.353,87	11.928,40	12.291,93	12.541,23	12.928,78

	Konstan (Milyar Rp)					
2.	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	4,85	5,06	3,05	6,00	6,12
3.	Inflasi (%)	2,71	2,97	3,21	3,25	3,17
4.	PDRB per Kapita ADHK (Ribu Rp)	14.610,26	15.279,75	14.321,70	17.260,00	18.200,00
5.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,47	4,94	4,18	4,82	4,76
6.	Angka kemiskinan (%)	21,45	20,53	20,32	16,42	14,76

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2014-2017; Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2018

Ket : *) RPJMD Kabupaten Wonosobo, 2016-2021

Sejalan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2019 yaitu “Pemantapan upaya pengentasan kemiskinan melalui harmonisasi pembangunan berkelanjutan” maka prioritas pembangunan ekonomi tahun 2019 adalah :

1. Peningkatan akses masyarakat miskin dan pemberdayaan masyarakat miskin.
2. Pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal yang didukung dengan penguatan kelembagaan dan sarana penunjang ekonomi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan di atas antara lain melalui :

1. Peningkatan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin desil 1 dan 2 melaluii RTLH, bantuan sambungan listrik, perbaikan sanitasi, jaminan kesehatan.
2. Pemberdayaan masyarakat miskin desil 3 dan 4 melalui pelatihan ketrampilan, perluasan akses modal, pendampingan berkelanjutan pada usaha mikro, padat karya produktif.
3. Pengembangan produk unggulan daerah dan kawasan agro techno park.
4. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis desa wisata yang didukung oleh ekonomi kreatif.

5. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas yang mendukung aktivitas perekonomian.
6. Pengembangan jaringan pemasaran yang efektif dan efisien.
7. Perbaikan iklim investasi yang kondusif melalui insentif dan kemudahan perijinan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, yang pendanaannya bersumber dari APBD, sumber pendanaan lainnya di luar APBD (NonAPBD) antara lain pendanaan melalui APBN, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha

melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial

Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Kabupaten Wonosobo yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2019 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 yang dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Sedangkan tiga komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 25, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah akan berjalan apabila suatu daerah mempunyai kemampuan fiskal yang baik. Dengan adanya kemandirian keuangan daerah, suatu daerah dapat mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah ini dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Perhitungan pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo ke depan tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah, potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah pada dasarnya tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah, maka kebijakan yang ditempuh antara lain :

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, yang diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi kelembagaan.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- c. Penyempurnaan atau revisi regulasi di bidang pendapatan asli daerah dan penyederhanaan sistem prosedur pelayanan.
- d. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui penyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu serta retribusi daerah.
- e. Optimalisasi PAD melalui pengembangan sistem aplikasi (penyederhanaan dan modernisasi system), banking system, e-ticketing.
- f. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya : pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen, dalam upaya peningkatan deviden/kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- g. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah.
- h. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah.
- i. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
- j. Monitoring sumber-sumber pendapatan untuk mengurangi kebocoran.

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah kabupaten Wonosobo tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.6

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 s.d Tahun 2019

No	Uraian	2017	Penetapan 2018	Prediksi 2019
1	Pendapatan asli daerah	307.170,76	205.810,31	208.345,31
	Pajak daerah	38.328,72	34.942,50	36.893,50
	Retribusi daerah	10.302,67	8.643,22	8.973,49
	Hasil pengelolaan	25.659,73	16.465,04	16.917,80

No	Uraian	2017	Penetapan 2018	Prediksi 2019
	kekayaan daerah yang dipisahkan			
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	234.879,64	145.759,56	145.560,54
2	Dana perimbangan	1.133.217,02	1.151.164,53	1.159.030,23
	Dana bagi hasil pajak/bukan pajak	39.124,03	38.685,31	38.685,31
	Dana alokasi umum	826.626,36	827.791,66	827.791,66
	Dana alokasi khusus	267.466,63	284.687,57	292.553,27
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	386.902,56	365.588,98	446.827,71
	Hibah	7.256,39	88.459,85	88.509,85
	Bagi hasil pajak	91.452,285	84.278,82	84.278,82
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0,00	0,00	0,00
	Bantuan keuangan	50.966,54	0,00	80.874,39
	ADD	191.496,63	184.100,31	184.414,65
	Dana insentif daerah	45.730,72	8.750,00	8.750,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	1.829.290,33	1.722.563,82	1.814.203,27

Sumber : BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2018
Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2018

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib tidak termasuk pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang ada di masing-masing OPD, yang meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Arah kebijakan belanja daerah dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pencapaian optimalisasi prioritas sasaran pembangunan melalui mekanisme penyusunan perencanaan partisipatif dan aspiratif, serta diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas dalam kerangka yang berkesinambungan. Untuk anggarannya disusun dengan prinsip *money follow program* dan berbasis *money follow function* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas dan fungsi OPD.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 maka kebijakan belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung diarahkan pada :

- a. Pencapaian visi misi Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2016-2021, serta pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar serta urusan pilihan.
- b. Memprioritaskan belanja yang menunjang pencapaian target indikator kinerja makro dan indikator kinerja OPD.
- c. Meningkatkan belanja yang berorientasi pada masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan wilayah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Memprioritaskan belanja yang terkait dengan penataan blok perkantoran Kabupaten Wonosobo.
- e. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Adapun realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2017 s.d 2019 dituangkan dalam Tabel III.7 berikut :

Tabel III.7
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2017	Penetapan 2018	Proyeksi 2019
1	Belanja tidak langsung	1.000.192,70	1.072.558,25	1.094.222,34
	Belanja pegawai	689.556,40	765.720,20	778.460,29
	Belanja hibah	14.202,40	15.582,60	17.376,30
	Belanja bantuan sosial	4.995,50	7.560,50	12.565,00
	Belanja bagi hasil kepada Kab & Pemerintah Desa	4.235,15	4.205,49	4.586,70
	Belanja bantuan keuangan	283.214,03	274.489,46	276.234,05
	Belanja tidak terduga	3.989,22	5.000,00	5.000,00
2	Belanja langsung	715.097,46	819.055,92	826.235,63
	Belanja pegawai	41.224,89	45.902,39	46.304,76
	Belanja barang dan jasa	362.856,76	411.519,18	415.126,49
	Belanja modal	311.015,81	361.634,35	364.804,38
	TOTAL JUMLAH BELANJA (1+2)	1.715.290,16	1.891.614,17	1.920.457,97

*Sumber : BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2018
Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2018*

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pada hakekatnya pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 terdiri atas beberapa unsur pembentukan yaitu, penerimaan pembiayaan daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah, terdiri atas penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah.

Realisasi dan proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo secara lengkap disajikan dalam Tabel III.8 berikut :

Tabel III.8.
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2017 s.d Tahun 2019

N o	Uraian	2017	Penetapan 2018	Proyeksi 2019
1	Penerimaan pembiayaan	178.694,89	179.050,35	120.760,70
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	178.536,00	179.050,35	120.760,70
	Pencairan dana cadangan	0,00		
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	158,90		
	Penerimaan Piutang Daerah	0,00		
2	Pengeluaran pembiayaan	21.230,50	10.000,00	14.506,00
	Pembentukan dana cadangan	0,00		
	Penyertaan modal daerah	21.230,50	10.000,00	14.506,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		157.464,57	169.050,35	106.254,70

Sumber : BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2018